## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Informasi data keuangan memiliki manfaat untuk para pemakai agar memberikan suatu pandangan dalam bertindak kedepan sebagai alat ukur menilai kinerja perusahaan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi atas laporan keuangan sangat diperlukan agar pengambilan keputusan para pemakai menjadi tepat. Informasi data keuangan yang telah diaudit eksternal sangat dibutuhkan, perannya diperuntukan menjaga kredibilitas suatu laporan keuangan perusahaan terlepas kesalahan suguhan materi dan sesuai aturan yang berlaku guna meyakinan pemakai.

Terdapat sebuah skandal melibatkan Miller *Energy* tahun 2011 mengakuisisi beberapa aset di Alaska senilai \$4,5 juta yang dilaporkan senilai \$480 juta dalam laporan keuangan tahun 2010 sehingga terdapat peningkatan aset secara signifikan 100 kali lebih besar dari nilai riilnya dilaporan keuangan taun berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Di tahun selanjutnya, KAP KPMG sebagai auditor mengemukakan unqualified opinion telah gagal menjalankan standar audit yang ditentukan *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*, terkait penemuan salah saji. Standar *PCAOB* mewajibkan auditor eksternal menganalisis dampak saldo awal pada akun terkait, seperti nilai aset. KPMG tidak bisa memperoleh bukti otentik ketika mengetahui manajemen melakukan penghitungan nilai wajar yang tidak sesuai. Disaat yang sama, prosedur audit yang dilakukan KPMG tidak dapat mendeteksi kecurangan atas nilai aset Alaska.

Ujung dari skandal tersebut, pada 15 Agustus 2017 Securities Exchange Committee (SEC) menjatuhkan denda sebesar lebih dari \$6.2 juta serta sanksi profesi kepada engagement partner kepada KPMG atas kegagalan audit yang dilakukan. Informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan, hal tersebut merugikan para investor karena kegalalan auditnya (McKenna, 2017) Dari sini penulis menyimpulkan bahwa partner memiliki pengaruh kepada kemampuan

2

auditor dalam menemukan kecurangan, sehingga ada hubungannya dengan fraud

triangle juga pada bagian tekanan (pressure) dari atasan dan juga pada variable

independensi auditor yang memiliki jabatan dibawah partner bisa saja merubah

opininya jika terdapat tekanan oleh atasan.

Fenomena lainnya terkait kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

ialah kasus RSM Tenon Group. Anggota Institute of Chartered Accountants in

Englands and Wales (ICAEW) Nicholas Boden, auditor hukum senior dan mitra

perikatan audit, telah didenda £ 114.750 dan juga ditegur habis-habisan setelah

mengakui pelanggaran. Denda PwC sebesar £ 6 juta dikurangi menjadi £ 5,1 juta

setelah diskon penyelesaian, dan perusahaan juga akan membayar £ 500.000 untuk

biaya Financial Reporting Council (FRC). Denda Boden sebesar £ 150.000

dikurangi menjadi £ 114.750, setelah penyesuaian untuk faktor-faktor yang

meringankan dan diskon untuk penyelesaian. RSM Tenon membenarkan

kejanggalan dalam auditnya atas RSM Tenon *Group* ditahun buku 2011. PwC dan

Boden telah mengakui bahwa perilaku mereka jauh di bawah standar yang layak

diharapkan dari seorang anggota dan firma anggota dan bahwa mereka gagal untuk

bertindak sesuai dengan prinsip dasar ICAEW tentang kompetensi profesional dan

kehati-hatian. Tindakan kesalahan yang diakui termasuk kegagalan dalam

memperoleh bukti audit dan menggunakan skeptisisme profesional. FRC

mengatakan pelanggaran itu ekstensif, terdiri dari lima tindakan terpisah yang

diakui sehubungan dengan bidang audit berikut: akrual pembayaran bonus, aspek-

aspek tertentu sehubungan dengan pengakuan pekerjaan yang sedang berlangsung

dan jumlah yang dapat dipulihkan pada kontrak, akuntansi untuk akun sewa,

penilaian penurunan nilai goodwill, dan perhitungan goodwill dalam hubungannya

dengan anak perusahaan. (Sweet, 2017)

Dari adanya uraian diatas, banyak cara yang timbul untuk melakukan

kecurangan (fraud), peran auditor sangat vital dalam meminimalisir praktik fraud

yang timbul. Kapabilitas auditor dalam menemukan kecurangan ialah karakter yang

berasal dari diri auditor untuk mengidentifikasi dan membuktikan terdapat

kecurangan di laporan keuangan (Nasution et al., 2012). Kapabilitas masing-masing

auditor berbeda yang disebabkan faktor seperti sikap skeptisme, independensi, dan

tekanan waktu. Menemukan fraud merupakan hal yang sangat diperlukan sebagai

Pandji Pratama, 2022

Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi Auditor, Tekanan Waktu Terhadap

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

3

seorang auditor, hal tersebut menuntut seorang auditor untuk memahami tandatanda apabila akan terjadi tindakan kecurangan selain itu juga auditor harus

anda apaona akan terjadi tindakan kecurangan seram itu juga additor naru.

memiliki sikap-sikap yang diperlukan untuk mendeteksi kecurangan. Sebagai

seorang auditor selain melakukan tugas dan prosedur pengauditan seharusnya juga

memiliki sikap-sikap seperti sikap skeptisme professional. Skeptisme professional

biasa diartikan sebagai sikap auditor yang mempertanyakan dan mengevaluasi

setiap data audit yang ditemukan. Auditor menghimpunkan dan menilai data audit,

disaat yang sama diperlukan sikap skeptisme professional harus digunakan oleh

seorang auditor (IAPI, 2013, SA 200 hlm. 14). Maka apabila seorang auditor dalam

melakukan proses audit menemukan informasi tambahan maka semakin dapat

membuktikan benar atau tidaknya.

Selain sikap skeptisme yang harus diterapkan, auditor sendiri perlu

menjunjung sikap independensi yang tinggi. Auditor harus dapat mendeteksi dan

melaporkan segala macam bentuk tindakan kecurangan yang ada tanpa terpengaruh

dengan keadaan ataupun tekanan yang didapatkan. Sikap independensi harus

dijunjung untuk meyakinkan laporan keuangan bebas dari fraud. Dalam penelitian

Biksa & Wiratmaja (2016) independensi berpengaruh signifikan dalam menemukan

fraud oleh seorang auditor. Maka dari itu semakin auditor menerapkan sifat

independensi, mendorong kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berbeda dalam penilitian Simanjuntak (2015) independensi tidak

terlalu berpengaruh dengan kemampuan auditor untuk menemukan fraud.

Tekanan waktu berada dalam masa tugas audit yang telah disusun sampai

batas waktu yang ada atau pun batas waktu yang ditentukan oleh klien untuk

menyelesaikan tugas. Sehingga masalah dapat timbul apabila rencana melewati

batas waktu yang telah disusun atau direncanakan dari awal. Saat hal tersebut terjadi

seseorang suka melewatkan hal-hal yang menurutnya tidak penting agar semua

sesuai dan tidak melewati batas waktu, akan tetapi hal tersebut dapat membuat

auditor tidak meyakini laporan keuangan yang sudah diaudit dan dapat

menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan (Anggriawan,

2014). Tekanan waktu ialah dimana saat seorang auditor dituntut atau didesak tugas

dengan jangka waktu atau batasan waktu yang bisa singkat sehingga dapat

menimbulkan kurang maksimalnya kinerja auditor dan dapat menyebabkan auditor

Pandji Pratama, 2022

Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi Auditor, Tekanan Waktu Terhadap

kurang mendeteksi kecurangan dikarenakan tertekan dengan jangka waktu yang ada sehingga menyebabkan auditor menyelesaikan tapi tidak teliti (Soenanto & Pesudo, 2020). Sehingga saat hal itu terjadi sikap skeptisme sangat berpengaruh apabila semakin tinggi sikap skeptisme maka semakin tingkat deteksi kecurangan dan sebaliknya apabila semakin rendah sikap skeptisme maka menyebabkan tidak terdeteksinya kecurangan yang ada.

Pedoman untuk kantor akuntan publik dalam mengendalikan nilai jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan menaati berbagai standar yang ditentukan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI. Jadi, setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) harus mempunyai program pengelolaan mutu yang harus digunakan pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review. Kantor Akuntan Publik (KAP) harus meninjau semua poin pengelolaan kualitas, sehingga dapat dilakukan dalam prakteknya, dalam menentukan prosedur dan pengelolaan kualitas. Mengenai poin-poin pengelolaan kualitas yang dimaksud yaitu, 1) Independensi sama dengan menegaskan kepada semua personel pada masing-masing tingkat organisasi wajib menegakkan independensi; 2) Penugasan Personel yakni menjamin bahwa kontak akan dikerjakan oleh petugas profesional yang memegang tingkat keprofesionalan dan keahlian kejuruan untuk kontak yang dimaksud; 3) Konsultasi adalah untuk menegaskan bahwa personel hendak mendapat informasi atau data yang memuaskan dan sesuai yang diperlukan dari orang yang mempunyai tingkat pemahaman, kemampuan, pertimbangan (judgement), dan kekuasaaan yang memadai; 4) Supervisi yakni memastikan bahwa pelaksanaan kontak memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh KAP; 5) Pemekerjaan (Hiring) yakni mengkonfirmasi bahwa semua orang yang ditugaskan mempunyai keterampilan sebaik-baiknya, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya secara profesional; 6) Pengembangan Professional yaitu menjamin bahwa masing-masing personel mempunyai pengetahuan mencukupi sehingga bisa bertanggung jawab atas kinerjanya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan adalah media untuk KAP untuk memberikan pengetahuan yang baik untuk personelnya agar dapat bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka dan untuk kemajuan pekerjaan mereka di KAP; 7) Promosi

5

(Advancement) yaitu untuk meyakinkan bahwa semua personel yang terpilih

mendapatkan promosi menyandang kapasitas yang memenuhi persyaratan untuk

jenjang karier yang lebih tinggi; 8) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien -

mengkonfirmasi apakah komitmen dari klien dapat diterima atau dilanjutkan untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang di mana

manajemen tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan

kehati-hatian (prudence); 9) Inspeksi - meyakinkan bahwa prosedur yang berurusan

dengan poin-poin lain pengelolaan kualitas telah dilaksanakan secara efektif

Alasan rasional yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian

diantaranya berdasarkan pada ditemukannya perbedaan hasil masing-masing

variabel dari penelitian terdahulu pada kapabilitas auditor dalam menemukan

kecurangan. Berbagai penelitian dari tiap variabel ditemukan hasil berbeda. Dari

alasan tersebut adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian

sebelumnya Rosiana et al. (2019) pengambilan responden berasal dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan pada penelitian ini mengambil dari KAP

daerah Jakarta Selatan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun

2021, karena menurut peneliti KAP memegang peran penting dalam proses

monitoring untuk meminimalisir Fraud di sebuah perusahaan, selain itu untuk

kriterianya mengambil responden dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, Penulis membangun rumusan masalah

diantaranya yaitu:

1. Apakah Skeptisme Profesional mempunyai dampak signifikan terhadap

kapabilitas auditor dalam menemukan kecurangan?

2. Apakah Independensi Auditor mempunyai dampak signifikan terhadap

kapabilitas auditor dalam menemukan kecurangan?

3. Apakah Tekanan Waktu mempunyai dampak signifikan terhadap kapabilitas

auditor dalam menemukan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka penelitian ini mempunyai tujuan

yaitus:

Pandji Pratama, 2022

Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi Auditor, Tekanan Waktu Terhadap

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

- 1. Untuk mengetahui dampak Skeptisme Profesional terhadap kapabilitas auditor dalam menemukan kecurangan.
- 2. Untuk mengetahui dampak Independensi Auditor terhadap kapabilitas auditor dalam menemukan kecurangan.
- 3. Untuk mengetahui dampak Tekanan Waktu terhadap kapabilitas auditor dalam menemukan kecurangan.

## 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang nantinya diinginkan penulis, yakni:

a. Manfaat Teoritis:

Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. Dan kontribusi atas rekomendasi hasil penelitian Simanjuntak (2015), Prasetyo (2013), dan Rosiana et al. (2019)

b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi KAP (Lembaga) dan Auditor (Sumber Daya Manusia) terkait pengetahuan dan kebijakan tentang kemampuan mendeteksi kecurangan.